

**ANALISIS PERUBAHAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
DI DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

***ANALYSIS OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL CHANGES IN
COMMUNITIES SURROUNDING THE COMMUNITY FOREST AREA (HKM)
IN AIK BERIK VILLAGE, NORTH BATUKLIANG DISTRICT, CENTRAL
LOMBOK REGENCY***

Aulia Dian Febriani¹, Hayati², Rosiady Husaenie Sayuti²

¹Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram

²Dosen Pembimbing di Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengelolaan hutan oleh masyarakat sebelum adanya IUPHKm, (2) Mengetahui pengelolaan hutan oleh masyarakat pada masa transisi (3) Mengetahui praktik pengelolaan hutan setelah mendapatkan IUPHKm (4) Mengetahui Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya setelah adanya HKm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan kemasyarakatan di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sebelum adanya program Hutan kemasyarakatan, masyarakat hidup berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat mencari kerja keluar desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tetap tinggal di desa banyak yang merambah hutan secara ilegal yang mengakibatkan hutan menjadi gundul (2) Pada masa transisi antara periode ilegal memasuki hutan dan setelah mendapatkan izin HKm, masyarakat mulai mempersiapkan untuk mengelola hutan dengan membentuk kelompok, melakukan pendataan, serta menetapkan batas dan pengaturan tata ruang. (3) Setelah adanya program HKm masyarakat mulai mengelola hutan dengan enanam multi purpose tree yang memiliki fungsi ekologis yaitu dapat mempertahankan kelestarian hutan akan tetapi di sisi lain dapat menghasilkan nilai ekonomi (4) Perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terjadi di desa aik berik indikatornya antara lain perubahan mata pencaharian, pemberdayaan masyarakat, penyesuaian terhadap norma dan nilai dalam pengelolaan hutan, pengetahuan pengelolaan kawasan, dan terbentuknya Kerjasama dan jaringan

Kata kunci : Hutan Kemasyarakatan, ekologi, ekonomi, berkelanjutan

ABSTRACT

This research aims to: (1) Knowing forest management by the community before the existence of IUPHKm, (2) Knowing forest management by the community during the transition period (3) Knowing forest management practices after obtaining IUPHKm (4) Knowing Economic, Social and Cultural Changes after HKm. The method used in this research is descriptive method. The unit of analysis in this study is the community around the community forest area in Aik Berik Village, North Batukliang District, Central Lombok Regency. The data used is qualitative data. The data sources used in this research are primary data and secondary data.

The results of this study show that: (1) Before the Community Forest program, the community lived below the poverty line. People looked for work outside the village to fulfill their needs. Many people who remained in the village illegally encroached on the forest which resulted in the forest becoming deforested (2) During the transition period between the illegal period of entering the forest and after obtaining the HKm permit, the community began to prepare to manage the forest by forming groups, collecting data, and determining boundaries and spatial arrangements. (3) After the HKm program, the community began to manage the forest by planting multi-purpose trees which have an ecological function that can maintain forest sustainability but on the other hand can generate economic value (4) Economic, social and cultural changes in the community that occur in Aik Berik Village, the indicators include changes in livelihoods, community empowerment, adjustments to norms and values in forest management, knowledge of area management, and the formation of cooperation and networks.

Keywords : Community Forestry, Ecology, Economy, sustainable

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan secara umum ditujukan untuk memenuhi dua fungsi, yaitu (1) fungsi ekologis dan (2) fungsi sosial, ekonomi dan budaya. Idealnya, kedua fungsi ini berjalan seimbang dan berkelanjutan. Kegagalan dalam mencapai keseimbangan itulah yang kemudian menimbulkan sejumlah masalah, antara lain pembabatan hutan yang tidak terkendali sebagai akibat dari tekanan ekonomi, perubahan persepsi sosial terhadap hutan dan terbatasnya lahan untuk kegiatan pertanian dan Industri. Dari total 1.070.000 Ha Luas kawasan hutan di NTB, 59.602 Ha diantaranya merupakan lahan kritis dan 6.173 Ha merupakan lahan sangat kritis.

Perhutanan sosial menjadi program besar pemerintah dalam rangka mendukung penghijauan kembali lahan hutan di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang perbaikan kualitas hutan, tidak dapat terealisasi tanpa adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Faktor dominan

keselarasan antara peran masyarakat dengan ruang ekologi hutan sebagai kunci kelestarian yang ingin dicapai program perhutanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tentang Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan unit analisis yaitu masyarakat sekitar kawasan HKm di Desa Aik Berik.

Penentuan daerah penelitian ditetapkan secara “*purposive sampling*” yaitu Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dilakukan karena di desa tersebut merupakan salah satu HKm terbesar di Lombok Tengah. Kemudian untuk penentuan jumlah Informan tidak ditentukan kuota, pengumpulan data akan dihentikan ketika sudah terbentuk pola jawaban yang sama dari para informan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petani melalui wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atas dinas terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei dan wawancara langsung kepada petani dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Umur Informan

Umur menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam berpikir maupun kemampuan bekerja

Tabel. 4.5. Umur informan

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	46-63	4	57,14
2	>64	3	42,86
Jumlah		7	100

Sumber: *Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.5. menunjukkan bahwa lebih dari setengah berada pada kisaran umur produktif sebanyak 4 informan (57,14%). Hal ini diterangkan oleh (Soekartawi, 2002) yang mengatakan bahwa kisaran umur produktif yaitu 15-64 tahun.

Tingkat Pendidikan

Tabel. 4.6. Pendidikan informan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	14,28
2	SD	2	28,58
3	SMP	1	14,28
4	SMA	2	28,58
5	Perguruan Tinggi	1	14,28
Jumlah		7	100

Sumber: *Data Primer diolah*

Berdasarkan Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa Pendidikan informan relatif merata di seluruh jenjang Pendidikan. Menurut suparih (2013) bahwa jenjang Pendidikan kebawah termasuk dalam golongan Pendidikan yang rendah.

I. Pengelolaan Hutan Sebelum Adanya IUPHKm

Sejarah Terbentuknya HKm

Sebelum adanya HKm, keadaan hutan di Desa Aik Berik sangat mengkhawatirkan meskipun hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Hutan itu mengalami kerusakan setelah diberlakukannya kebijakan yang mengizinkan pemanfaatan kayu hutan untuk bangunan rumah dan gedung pada era orde baru. Kebijakan tersebut memberikan peluang untuk eksploitasi hutan secara besar-besaran yang pada tahun 1975.

Upaya melakukan reboisasi di hutan yang berbatasan dengan pemukiman penduduk Desa Aik Berik dilakukan beberapa kali namun tidak berhasil. Sebaliknya, aktivitas pembalakan terus berlanjut, mengakibatkan hutan semakin gundul. Di tengah eksploitasi hutan yang masif, penduduk di sekitar hutan tetap hidup dalam kemiskinan. Mereka hanya bisa menyaksikan kayu hasil penebangan diangkut dengan puluhan truk. Dampak degradasi kawasan tersebut mulai terasa pada tahun 1990-an. Mata air yang ada di dalam hutan tidak lagi mengalir deras. Hal ini menyebabkan sering terjadinya konflik antara petani Desa Aik Berik yang mulai kesulitan mendapatkan air untuk pertanian mereka. Padahal, mata air tersebut merupakan sumber pengairan sawah milik warga. Berkurangnya aliran air ini membuat penduduk di hulu dan hilir terlibat dalam konflik. Sesuai dengan pernyataan informan no.1:

"Kami yang tinggal di daerah hulu dituntut menjaga hutan agar ketersediaan air terjaga. Tapi kami juga ingin ada imbal baliknya," (Wawancara 20 Juni 2023) Informan no.1

Pada 1995, Informan no1, Marwi yang saat itu menjabat Kepala Desa Aik Berik, Marwi menemui Dinas Kehutanan NTB untuk menawarkan solusi.

"Kami mau bikin hutan itu hijau lagi asalkan warga mendapat hak kelola," (wawancara 20 juni 2023) Informan no.1

Mata Pencaharian

Masyarakat di lokasi penelitian menggantungkan mata pencaharian utama pada pertanian di lahan kering. Namun, karena lahan yang terbatas, bergantung sepenuhnya pada pertanian menjadi tidak dapat diandalkan. Situasi ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang menjadi buruh tani. Keterbatasan kepemilikan lahan juga berdampak lain, di mana petani lebih memilih mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Banyak penduduk di Desa Aik Berik yang bekerja sebagai buruh bangunan di kota, serta banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan utama ke Malaysia. Keterbatasan lahan, kurangnya kesempatan kerja, pendapatan yang rendah, dan tanggungan keluarga yang besar menjadi faktor pendorong migrasi internasional bagi penduduk desa Aik Berik. Seperti pernyataan informan no.2:

"Tiang laek nendak puntik lek batur tiang sak bedoe kebon bangket, begelining tiang ngumpulan lek bale batur nok" artinya (Dulu saya kerjanya membeli pisang ke teman-teman yang mempunyai kebun dan sawah kemudian saya jual lagi) (wawancara 3 juli 2023) Informan no.2

Informan no.3 yang sebelumnya bekerja sebagai TKI menyatakan:

"Dulu sebelum ada HKm itu saya pergi ke Malaysia jadi TKI, di desa sudah ndak ada pekerjaan mau ndak mau harus pergi keluar biar bisa bertahan hidup" (wawancara 3 juli 2023) Informan no.3

II. Pengelolaan Pada Masa Transisi

Pengelolaan hutan pada masa transisi ini merupakan peralihan dari periode illegal memasuki hutan menuju periode setelah mendapatkan izin HKm. Pada tahun 2000, dikeluarkan izin sementara untuk mengelola hutan seluas 1.042 hektar yang mencakup Desa Aik Berik, Desa Setiling, Desa Lanta, dan Desa Karangsidemen. Namun, setelah izin diperoleh, muncul masalah baru. Izin hak kelola hutan tersebut ternyata dipegang oleh pihak lain yang tidak melakukan kegiatan konkret di area tersebut. Penentuan batas hutan juga menjadi permasalahan karena Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menuduh bahwa warga telah memasuki wilayah hutan lindung sebelum area tersebut diajukan sebagai HKm. Proses penyelesaian masalah ini memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya, pada tahun 2007, Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin HKm. Desa Aik Berik mendapatkan izin HKm seluas 842

hektar, di mana sekitar 600 hektar digunakan oleh warga desa. Sisanya dialokasikan untuk kawasan lindung dan kawasan wisata air terjun Benang Setukel dan Benang Kelambu. Warga Aik Berik juga bekerja sama dengan warga dari tiga desa lainnya untuk membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan). Terdapat 105 kelompok HKm yang tergabung dalam empat gapoktan.

III. Pengelolaan Setelah adanya IUPHKm

Pengelolaan Lahan

Dari sisi pengelolaan lahan, terdapat perubahan yang cukup penting. Pada periode transisi sebelum adanya izin resmi HKm, petani melakukan penanaman dengan cara seadanya tanpa memperhatikan teknik budi daya tanaman. Petani tidak memperhatikan jarak tanam dan tidak ada pemupukan yang rutin. Setelah introduksi pola HKm pada kawasan hutan, petani mulai mengelola lahan secara lebih tertata baik pada lahan milik maupun pada lahan HKm. Lahan HKm dikelola dengan pola agroforestry (tumpangsari). Pemupukan dilakukan setidaknya satu tahun sekali untuk tanaman tahunan. Adapun jarak tanam diatur sehingga tidak mengganggu pertumbuhan antar tanaman.

Selain melakukan pengaturan jarak tanam, petani lahan HKm juga menerapkan pola tanam dengan memperhatikan daur tumbuh tanaman. Fase awal penanaman di lahan HKm didominasi oleh tanaman pisang (*Musa paradisiaca*). Tingkat dominansi tanaman pisang pada fase awal HKm berdasarkan argumen bahwa lahan HKm sebelumnya merupakan lahan kritis. Petani pada lahan HKm tersebut berpandangan bahwa tingkat keberhasilan penanaman pohon pada lahan kritis akan sangat rendah jika tidak didahului dengan tanaman yang dapat menjadi pionir. Oleh karena penanaman tanaman pisang sangat mendukung bagi keberhasilan penanaman tanaman berikutnya. Bersamaan dengan tumbuh suburnya tanaman pisang, petani kemudian menanami pohon-pohonan dan tanaman lain seperti kemiri, durian, kopi, alpukat, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan informan no.4

“Tanaman awal yang di tanam itu pohon pisang, selain cepat berbuah dan menghasilkan pendapatan, resikonya juga sedikit jadi cocok untuk ujicoba tanaman pertama di hutan itu” (Wawancara 3 juli 2023) Informan no.4”

HHBK Sebagai Komoditas Utama

Sebagaimana disebutkan pada paparan sebelumnya, hutan yang menjadi lokasi program HKm sebelumnya merupakan lahan kritis. Banyaknya lahan kritis bermula ketika reformasi bergulir. Hutan di daerah Lombok Tengah pada era tersebut banyak yang menjadi lahan kritis karena aktivitas perambahan liar dan *illegal logging*. Ketika program HKm berjalan, lahan hutan kemudian banyak ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagian besar tanaman tersebut merupakan jenis hasil hutan bukan kayu

(HHBK). Seperti pernyataan informan no.1:

“Yang kita tanam di HKm itu yang dapat menghasilkan ekonomi tinggi, tapi selain itu juga kita tanam pohon yang dapat menjaga ekologi hutan”
(wawancara 20 juni) informan no.1

IV. Perubahan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perubahan Ekonomi

Perubahan Ekonomi masyarakat desa Aik Berik yang tinggal disekitar hutan setelah penetapan program HKm terkait ekonomi yaitu peralihan tata cara pemanfaatan sumberdaya hutan. Sebelum adanya program HKm pendapatan masyarakat hanya bergantung dari pembukaan lahan hutan yang kemudian ditanami jagung, padi dan kopi.

Tabel Perubahan Ekonomi

Indikator	Sebelum adanya HKm	Setelah adanya HKm
Mata pencaharian	- Masyarakat menebang kayu di hutan secara illegal - Buruh tani - TKI	Masyarakat mengelola hutan dengan menanam Multi Purpose Tree sebagai penghasilan utama
Pemberdayaan Masyarakat	Tidak ada pemberdayaan	-Pemberian sarana prasarana pertanian untuk pengelolaan hutan oleh pemerintah -80% masyarakat yang tinggal di perbatasan hutan mendapatkan hak mengelola HKm -Penyuluhan tentang tata cara pengelolaan HKm -Pengolahan produk pertanian seperti kripik pisang dan kopi

Adanya skema HKm yang ditunjang dengan pendampingan dan jalinan kerja yang intens memberikan peningkatan pengetahuan mengenai tata cara mendiversifikasi bagian lain tanaman menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi. Serta peningkatan kreatifitas olah produk. pengoptimalan pemanfaatan HHBK pada kawasan hutan dan menjadi peluang bisnis untuk masyarakat sekitar hutan.

Perubahan Sosial dan Budaya

Gapoktan di desa aik berik beranggotakan orang-orang yang berdomisili disekitar areal HKm yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat satu sama lain, ikatan kekeluargaan antara Masyarakat Desa Aik Berik menjadikan adaptasi sosial yang ada terjalin dengan baik antar anggota kelompok tani maupun dengan stakeholder dalam melaksanakan pengelolaan HKm. Secara rinci perubahan sosial masyarakat Desa Aik berik sekitar Areal HKm dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Perubahan Sosial Ekonomi dan Budaya

Indikator	Sebelum adanya HKm	Setelah adanya HKm
Penyesuaian terhadap nilai, norma, dan kebiasaan dalam mengelola hutan	-tidak adanya pertimbangan pentingnya keberadaan hutan atas segala fungsinya (fungsi lindung, dan konservasi) - Aturan formal terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan hanya sekedar diketahui,	-pertimbangan fungsi lindung dan konservasi hutan telah menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan - selain kepatuhan pada aturan-aturan formal pengelolaan dan pemanfaatan hutan juga adanya kesepahaman nilai dan sanksi yang mengikat terhadap setiap anggota gapoktan HKm utama
Pengetahuan Pengelolaan Kawasan hutan	Pengelolaan kawasan hutan hanya melihat pada fungsi produksi tanpa pertimbangan keberlanjutan	- Pengelolaan dan pemanfaatan didasarkan atas pertimbangan fungsi hutan dan keberlanjutannya - Keterbukaan menerima masukan terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan dari pihak yang berkompeten - pergeseran pemanfaatan hutan dari kayu menjadi pengelolaan HHBK
Kerjasama dan Jaringan	Tidak ada kerjasama	Kerjasama dengan berbagai pihak (Pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Sebelum adanya program Hutan kemasyarakatan, masyarakat hidup berada dibawah garis kemiskinan. Masyarakat mencari kerja keluar desa sebagai buruh bangunan di kota atau menjadi TKI di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tetap tinggal di desa banyak yang merambah hutan secara illegal yang mengakibatkan hutan menjadi gundul.
- 2) Pada masa transisi antara periode illegal memasuki hutan dan setelah mendapatkan izin HKm, masyarakat mulai mempersiapkan untuk mengelola hutan dengan membentuk kelompok, melakukan pendataan, serta menetapkan batas dan pengaturan tata ruang.
- 3) Setelah adanya program HKm masyarakat mulai mengelola hutan dengan menanam multi purpose tree yang memiliki fungsi ekologis yaitu dapat mempertahankan kelestarian hutan akan tetapi di sisi lain dapat menghasilkan nilai ekonomi seperti pisang, durian, kopi, kakao, kelengkeng, dll.
- 4) Perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terjadi di desa aik berik indikatornya antara lain perubahan mata pencaharian, pemberdayaan masyarakat, penyesuaian terhadap norma dan nilai dalam pengelolaan hutan, pengetahuan pengelolaan kawasan, dan terbentuknya Kerjasama dan jaringan

4.2. Saran

Kawasan hutan lain yang masih memanfaatkan kawasana hutan dengan cara penebangan ilegal sebaiknya mengadaptasi skema perhutanan sosial ini karena memberikan efek berkelanjutan hutan, dan menjaga kelestarian hutan di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- [DISLHK] Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Data Lahan Kritis di Nusa Tenggara Barat 2019*. Mataram: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, NTB.
- Abdussamad, Zuchri. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Affandi, Odding. 2002. *Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kehutanan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Annisa, W, R., Siti, Zunariyah. 2018. Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat di Desa Kaligintung (Studi Kasus PHBM di Desa Kaligintung, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur). *Journal of Development and Sosial Change* 1(1): 76-86
- Astuti, Nurrochmat, D, R, Aceng, H. 2020. Community Forest Scheme:

Measuring Impact in Livelihood Case Study Lombok Tengah Regency, West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 26(1): 52-58

Burhan, Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hasan, R., Nurrochmat, D, R. 2020. Transformasi Penghidupan Masyarakat Pasca Program Hutan Kemasyarakatan (HKm). *Jurnal Litbang* 16(2): 139-251

Lauer, Robert, H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. RhinekaCipta

Lumintang, Juliana. 2015. Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I. *Jurnal Acta Diurna* vol. 4 No.2

Manik, K,E,S. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana Muktasam. 2004. Analisis Sosial dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) di Batukliang Utara – Lombok Tengah. *Jurnal Agrimansion* 4 (2): 168-183.

Muktasam. 2005. *Sustainable Forest For Sustainable Lombok: Putting Sociological Variables Into Action* dalam Mitsuda dan Sayuti (editor), *Sustainable Lombok: The Rich Nature and Rich People in the 21st Century*. Mataram: Universitas Mataram Press

Nurfatriani, F., Alviya, I. 2019. Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha Untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 16(1): 47-66

Nurjaya, I,N. 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal 36 Jurisprudence* 2(1): 35-55

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, Yogyakarta: Gaya Media

Ranjabar, Jacobus. 2008. *Perubahan Sosial dalam Teori Makro: Pendekatan Realitas Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Riyanto, Adi. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Setiadi, Elly, M., Usman Kolip. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Sumanto, S, E. 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6(1): 13-25

Yakin, A., L. Sukardi, M. Yusuf, Syarif, H. 2019. Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga Sekitar Hutan di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNRAM 20(1): 1411-826

